

DIPLOMASI PUBLIK SEBAGAI INSTRUMEN PENGALANG DUKUNGAN INTERNASIONAL BAGI PALESTINA

Giasinta Livia

Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

The preference of states to use public diplomacy strategy to support the realization of their national interests has become an international phenomenon nowadays. Public diplomacy in the modern era of International Relations turns out to be an instrument for states to exercise their soft power, as well as to convey specific messages intended for the international public. Thus, public diplomacy could be an alternative way for states that had serious barriers in practicing formal diplomacy in conventional ways. Palestine, as an entity whose legal status remains debatable, also utilizes public diplomacy as its strategy to gain support and recognition from the international community. This paper would aim to answer the research question on how Palestine exercises its public diplomacy, particularly digital diplomacy and citizen diplomacy, to gain international recognition for its statehood. By means of the use of social media and the exposure on Palestine's internationally well-known figure, Palestine is building a perception that Palestine itself is a state with no difference with the other states — therefore deserves independence and total sovereignty over its territory.

Keywords: public diplomacy, Palestine, international recognition, digital diplomacy, social media, citizen diplomacy, Mohammed Assaf.

PENDAHULUAN

Hingga kini, status Palestina sebagai sebuah negara masih belum mendapatkan pengakuan secara resmi di dunia internasional. Di tingkat organisasi antar-pemerintah terbesar di dunia, yaitu PBB, Palestina masih berstatus sebagai *non-member observer state* sejak 29 November 2012.¹ Di beberapa negara, Palestina sudah memiliki kedutaan besarnya sendiri, namun di beberapa negara lainnya, Palestina masih diwakili oleh Kantor Perwakilan (*Representative Office*). Level

¹ Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, New York: United Nations, 2012.



keterwakilan Palestina di sebuah negara ini dipengaruhi oleh bagaimana suatu negara mengakui kedaulatan Palestina, apakah sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat, atau sebagai entitas semi-autonom.

Akibat kondisi politik yang membingungkan ini, kemampuan Kementerian Luar Negeri Palestina dan Kedubes Palestina yang ada di seluruh dunia menjadi cukup terbatas dalam melakukan hubungan diplomatik konvensional dengan negara-negara lainnya.² Palestina sebagai sebuah entitas yang sedang merintis dan mengumpulkan pengakuan internasional tentu saja membutuhkan strategi lain untuk dapat menyuarakan kepentingannya dan berhubungan dengan negara lain. Karena itulah, Palestina kini mulai melirik strategi diplomasi publik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari negaranya ke dunia internasional, terutama untuk mencari dukungan internasional atas konflik sengketa wilayah Israel-Palestina yang hingga kini belum usai.

Dalam makalah ini, upaya diplomasi publik yang dimaksud adalah segala upaya yang berada di bawah komando resmi pemerintahan Palestina melalui organisasi *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang berafiliasi dengan kelompok Fatah. Di bawah rezim ini, nama resmi untuk negara Palestina yang banyak digunakan yaitu *State of Palestine*. Cakupan wilayah yang dipimpin oleh PLO ini mencakup wilayah West Bank A dan B, sementara wilayah Palestina lainnya yaitu Gaza dipimpin oleh pemerintahan lain yang berafiliasi dengan kaum Hamas.³ Pemerintahan *State of Palestine* dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas (Abu Mazen) sebagai kepala negara dan Perdana Menteri Rami Hamdallah sebagai kepala pemerintahan. *State of Palestine* memiliki 2 lembaga negara yang bertugas untuk menjalin hubungan luar negeri. Lembaga pertama yaitu Kementerian Luar Negeri *State of Palestine* dipimpin oleh Menteri Luar Riad Malki, bertugas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan

² Samir Awad, "Public Diplomacy and The Question of Palestine," *International Humanities Studies* Vol. 2 No. 3 (2015): 21-40.

³ "Palestinian Government," *Mission of Palestine in Denmark*, diakses pada 20 November 2016, <http://palestine.dk/palestine/government/>.



bidang-bidang lainnya seperti layaknya kementerian luar negeri pada umumnya. Sementara, lembaga kedua yaitu *Negotiations Affairs Department* (NAD) secara khusus bertugas untuk memantau dinamika hubungan antara Israel dan Palestina, terutama setelah penandatanganan perjanjian *ad interim* antara kedua belah pihak. NAD sendiri memiliki dua kantor pusat, yaitu di Gaza dan di Ramallah.⁴ Kedua lembaga inilah yang menjadi aktor utama yang menjadi komando atau otak di balik pelaksanaan diplomasi publik di Palestina.

LANDASAN KONSEPTUAL

Konsep diplomasi publik memiliki berbagai definisi, namun demikian definisi yang digunakan dalam makalah ini adalah definisi dari Michael McClellan. Menurut **Mc Clellan, diplomasi publik adalah sebuah upaya perencanaan strategis dan pemrograman informasi, budaya, dan edukasi dari sebuah negara (*advocate country*) untuk menciptakan opini publik di negara target yang dapat membuat pemimpin politik di negara target mendukung tujuan dari kebijakan luar negeri *advocate country*.**⁵ Dari definisi di atas, terlihat bahwa tujuan dari diplomasi publik yaitu untuk menciptakan iklim yang suportif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri sebuah negara dengan memahami, memberikan informasi, dan mempengaruhi pihak eksternal yang menjadi target dalam upaya diplomasi tersebut. Dengan demikian, persepsi dari pihak eksternal dapat mendukung dan memperkuat pelaksanaan sebuah kebijakan luar negeri, dan bukan menjadi hambatan dalam eksekusinya.

Mengingat luasnya definisi diplomasi publik, maka instrumen yang dapat digunakan dalam diplomasi publik juga beragam. Dalam makalah ini, akan dijabarkan dua konsep diplomasi publik yang digunakan oleh Palestina, yaitu *digital*

⁴ "Palestinian Government," *Mission of Palestine in Denmark*.

⁵ Michael McClellan, "Public Diplomacy in the Context of Traditional Diplomacy," dipresentasikan di Vienna Diplomatic Academy, Vienna, 2004, <http://www.publicdiplomacy.org/45.htm>.



diplomacy dan *citizen diplomacy*. Hal yang perlu diingat adalah bahwa kedua jenis diplomasi ini juga tidak memiliki satu definisi universal di seluruh dunia, sehingga penerapan instrumen diplomasi ini dapat berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, dalam makalah ini akan dijelaskan asumsi, fitur, dan karakteristik dasar yang dimiliki keduanya.

Digital diplomacy merupakan sebuah strategi diplomasi yang melibatkan serangkaian **teknik dan perangkat digital untuk mendukung tujuan diplomasi** suatu negara.⁶ *Digital diplomacy* tidak hanya terbatas dengan penggunaan media sosial, tapi juga melibatkan analisa *website*, Big Data, dan *platform* digital lainnya untuk mendukung promosi nilai-nilai yang ingin disebarkan oleh negara melalui diplomasi publik. Menurut Gokhan Yuchel, berbeda dengan upaya diplomasi konvensional, *digital diplomacy* melibatkan semakin banyak aktor dan entitas baru, dengan komunikasi melampaui batas negara, hirarki, dan batasan-batasan lainnya. Tujuan dilakukannya *digital diplomacy* ini tidak lain ialah berusaha untuk melibatkan semua pihak tersebut untuk berkomunikasi dan bertukar ide melalui *platform* digital.⁷

Citizen diplomacy didefinisikan sebagai upaya untuk **melibatkan warga negara** atau individu dalam program dan aktivitas terutama di sektor privat, untuk meningkatkan **cross-cultural understanding dan pengetahuan** di antara kelompok yang berbeda budaya dan negara sehingga dapat terbentuk sikap saling menghargai di antara kedua belah pihak.⁸ Hal ini berimplikasi bahwa pada dasarnya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjadi *citizen diplomat* bagi negaranya, ketika

⁶ Shaun Rloda, "Cyber Diplomacy vs. Digital Diplomacy: A Terminological Distinction," *University of Southern California Center of Public Diplomacy*, diakses pada 22 November 2016, <http://uscpublicdiplomacy.org/blog/cyber-diplomacy-vs-digital-diplomacy-terminological-distinction>.

⁷ Gozia Brzezinska, "Digital Diplomacy – Why Do We Need to Talk About It," *Portland Communication*, diakses pada 19 November 2016, <http://www.portland-communications.com/publications/age-of-digital-diplomacy/digital-diplomacy-why-do-we-need-to-talk-about-it/>.

⁸ "Citizen Diplomacy: Building a Nation of Global Citizen Diplomats," *Public Diplomacy Magazine University of Southern California*, diakses pada 23 November 2016, <http://publicdiplomacymagazine.com/citizen-diplomacy-building-a-nation-of-global-citizen-diplomats/>.



bertemu dan berinteraksi dengan warga dari negara lainnya. Peran penting individu dalam diplomasi publik juga ditegaskan dengan definisi dari Paul Sharp, yang mendefinisikan diplomasi publik sebagai sebuah proses dimana **hubungan langsung dengan masyarakat** dalam sebuah negara berusaha dicapai untuk memenuhi kepentingan dan **mewujudkan nilai-nilai** negara tertentu.⁹ Dalam konsep *citizen diplomacy* ini, dapat dilihat bahwa kata kuncinya ialah proses melibatkan warga negara atau individu dalam proses diplomasi, dan tujuan diplomasi untuk meningkatkan pengetahuan terhadap nilai dan budaya yang dimiliki sebuah negara.

Tujuan Diplomasi Publik Palestina

Setelah meninjau konsep dan definisi mengenai diplomasi publik, maka elemen yang perlu menjadi perhatian adalah tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai negara melalui diplomasi publik itu sendiri. Walaupun tidak pernah memberikan pernyataan secara langsung mengenai tujuan di balik diplomasi publiknya, melalui berbagai aktivitas diplomasi publik yang dilakukan Palestina, dapat dianalisa bahwa fokus Palestina adalah untuk meningkatkan dukungan internasional terhadap Palestina untuk menjadi sebuah negara berdaulat, dengan entitas legal yang diakui di dunia internasional. Hal ini berarti pula bahwa segala pelanggaran hak-hak asasi warga negara Palestina yang berlangsung di atas wilayah Palestina perlu mendapatkan perhatian internasional dan segera diakhiri.¹⁰

Hal yang kemudian membuat diskusi mengenai diplomasi publik Palestina menjadi menarik adalah bagaimana pesan dan kepentingan politik Palestina tersebut diungkapkan melalui usaha diplomasi publik yang langsung menjangkau masyarakat internasional. Bila pesan-pesan politik tersebut disampaikan secara literal, maka

⁹ Jan Melissen, *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.

¹⁰ Amal Jadou, "The Palestinians Diplomatic Corps," *This Week in Palestine*, Issue #223 (2016), diakses pada 22 November 2016, <http://thisweekinpalestine.com/the-palestinian-diplomatic-corps/>.



masyarakat internasional bukan tidak mungkin langsung menolak gagasan yang disampaikan dalam diplomasi publik tersebut. Namun demikian, Palestina kini banyak menggunakan cara-cara yang lebih halus dan tidak terkesan bermuatan politis dalam diplomasi publik untuk menyampaikan kepentingan negaranya, yang diungkapkan melalui strategi *digital diplomacy* dan *citizen diplomacy*. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut, maka makalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian: bagaimanakah upaya-upaya diplomasi publik yang ditempuh Palestina melalui *digital diplomacy* dan *citizen diplomacy* untuk mendapatkan dukungan di dunia internasional?

Digital Diplomacy: Wajah Diplomasi Publik Palestina di Dunia Maya

Dewasa ini, penggunaan media sosial dan media publikasi *online* lainnya menjadi sangat penting dalam melancarkan usaha diplomasi publik. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi yang membuat akses informasi kini dapat diakses siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Di tingkat global, pada tahun 2016 tercatat setidaknya 3,4 milyar penduduk dunia atau sekitar 46,1% telah menggunakan internet.¹¹ Usaha diplomasi publik yang memanfaatkan media *online* atau internet ini juga membantu signifikansi dan efektivitas aktivitas diplomasi, mengingat jangkauannya yang sangat luas dan mencakup seluruh dunia, dengan biaya yang jauh lebih kecil daripada upaya diplomasi konvensional.

Diplomat Palestina juga memanfaatkan media *online* dan media sosial sebagai corong diplomasi publik Palestina ke seluruh dunia. Dalam *digital diplomacy* Palestina, setidaknya terdapat dua fokus yang ingin disampaikan, yaitu untuk

¹¹ "Internet Users," *Internet Live Stats*, diakses pada 19 November 2016, <http://www.internetlivestats.com/internet-users/>.



menunjukkan pengakuan internasional yang telah diperoleh Palestina, serta untuk menciptakan persepsi bahwa Palestina kini dalam tahap "*state in the making*."¹²

Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, maka Palestina perlu mengekspos segala macam dukungan yang telah diperoleh Palestina dari berbagai pihak. Dalam media sosial yang dimilikinya, NAD PLO (@nadplo) secara aktif menunjukkan bagaimana Palestina sudah menjalin hubungan dengan negara lain sebagaimana negara berdaulat pada umumnya. Salah satu contohnya dapat dilihat melalui sebuah *tweet* di akun @nadplo pada tanggal 2 Juni 2016, yang menunjukkan bahwa Sekretaris Jenderal PLO, Saeb Erekat, telah berbicara dengan Presiden Prancis Francois Hollande dalam France Peace Conference. Dalam pembicaraannya, Erekat menegaskan bahwa Palestina berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama sebagaimana dinikmati negara lainnya, terutama dengan Israel.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Palestina terus-menerus menempuh upaya-upaya diplomasi dengan negara-negara lain dalam usaha memperoleh kedaulatannya, termasuk dengan Prancis sebagai salah satu negara *middle power*.

¹² Ilan Manor, "Evaluating Palestine's Digital Diplomacy," *University of Southern California Center of Public Diplomacy*, diakses pada 15 November 2016, <http://uscpublicdiplomacy.org/blog/evaluating-palestines-digital-diplomacy>.

¹³ Ibid.





Gambar 1: *Tweet* mengenai Keterlibatan Palestina dalam French Peace Conference

Seperti negara lain pada umumnya, Palestina juga mengeluarkan pernyataan resminya ketika sebuah peristiwa penting terjadi di dunia internasional. Pada tanggal 15 Juli 2016, akun Twitter resmi PLO merilis pernyataan resminya yang menyatakan solidaritas dan belasungkawa sedalam-dalamnya terhadap korban aksi terorisme di Nice, Prancis. Yang menarik, *tweet* ini dimulai dengan kata “*State of Palestine*,” menunjukkan kedudukan Palestina dalam hal ini sebagai sesama negara yang memiliki status dan kedudukan setara dengan Prancis dan negara lainnya. Selain itu, Palestina juga menulis bahwa “... *Palestina firmly stands in solidarity with France in this painful time*,” yang menyiratkan bahwa Palestina sebagai sebuah negara juga dapat merasakan situasi yang sedang dialami oleh negara Prancis.



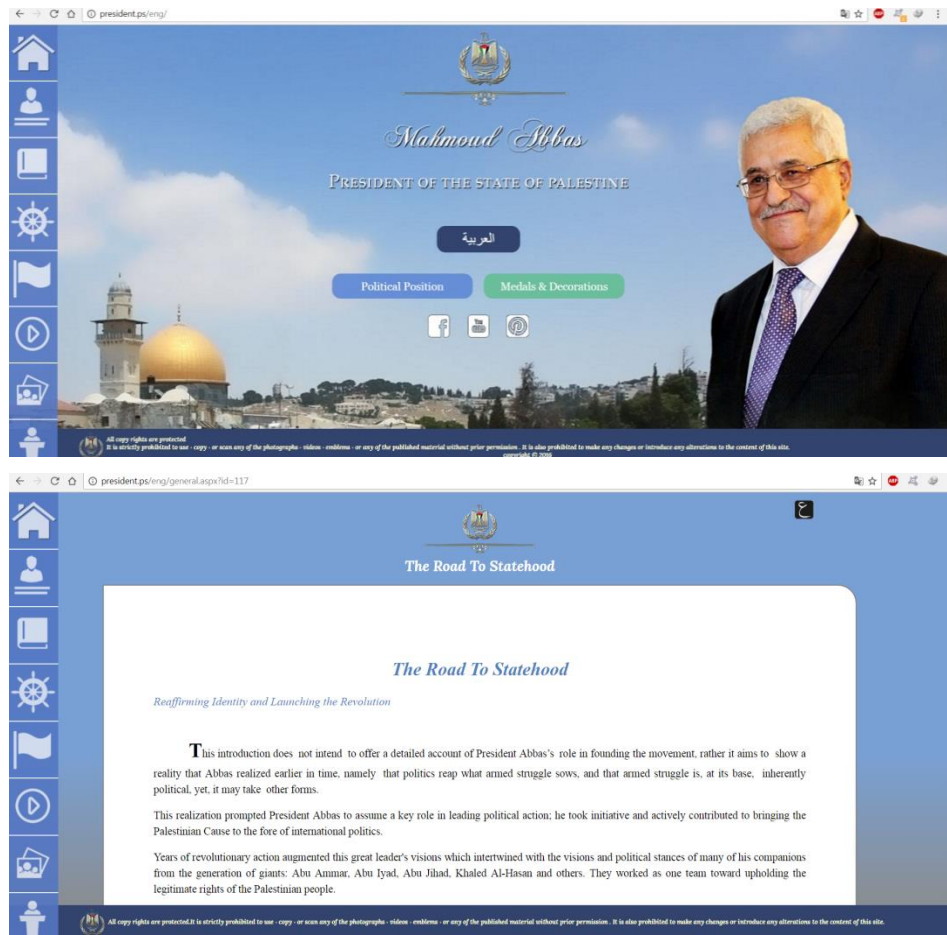


Gambar 2: *Tweet* mengenai Belasungkawa Palestina terhadap Aksi Teror di Paris

Selain melalui media sosial, Palestina juga aktif melakukan diplomasi publik melalui media *online* lainnya. Salah satunya adalah melalui *website* kepresidenan yang dimiliki oleh Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Dalam *website* kepresidenan yang dapat diakses melalui www.pres.ps, banyak dituliskan mengenai latar belakang dan biografi presiden, buku dan publikasi yang telah diterbitkannya, aktivitasnya sehari-hari sebagai seorang presiden, serta dokumentasi kegiatan kepresidenannya dari waktu ke waktu. Namun demikian, yang membedakan *website* ini dengan *website* presiden negara lain adalah adanya sebuah *tab* dalam *website* yang berjudul “*Road to Statehood*.” Dalam penjelasan di *tab* tersebut, secara detil dijabarkan bagaimana sejarah perjuangan Palestina sejak dulu hingga sekarang untuk menjadi sebuah negara merdeka. Terdapat pula sebuah pernyataan yang menarik, dimana ditulis bahwa “... *the notion of a Palestinian entity or a Palestinian state came into*



being as a right of Palestinian people among other inalienable right, most notably, the right of return and the right to self-determination.”¹⁴ Pernyataan ini sekali lagi menegaskan bahwa hak-hak rakyat Palestina untuk tinggal di atas wilayahnya sendiri, menjadi negara yang merdeka, dan berdaulat merupakan hak dasar yang tidak bisa ditawar lagi.



Gambar 3: Website Resmi Presiden Palestina

¹⁴ “The Road to Statehood,” *President of the State of Palestine Official Website*, diakses pada 18 November 2016, <http://president.ps/eng/general.aspx?id=117>.



Melalui ketiga contoh di atas, dapat dilihat bahwa Palestina secara konsisten menampilkan persepsi bahwa negaranya kini dalam tahap “*state in the making*,” di mana Palestina kini semakin terlibat dalam interaksi hubungan politik dan diplomatik dengan negara-negara lainnya dan terus mencari dukungan untuk memperoleh pengakuan secara internasional. Lebih dari sekedar dokumentasi atau pemberitaan, konten-konten yang terdapat dalam media sosial dan *website* resmi Presiden Palestina merupakan suatu upaya pemrograman informasi kepada *netizen* untuk menciptakan opini publik internasional bahwa eksistensi Palestina memang nyata dan semakin diakui di tingkat internasional. Tata bahasa, gambar, dan berita yang dipilih juga berusaha untuk menunjukkan bahwa Palestina hingga kini masih berjuang dan tidak akan berhenti untuk terus memperjuangkan kemerdekaan di atas wilayahnya. Melalui upaya pemrograman informasi dan pembentukan opini publik inilah, dapat dilihat bahwa media sosial dan *website* Presiden Palestina menjadi salah satu instrumen diplomasi publik Palestina.

Mohammed Assaf, Aktor Penting *Citizen Diplomacy* Palestina

Sebagaimana yang pernah diungkapkan Paul Sharp, individu juga menjadi aktor sentral dalam diplomasi publik. Namun demikian, bila aktor *citizen diplomacy* ini merupakan seorang selebritis atau *public figure*, maka efek dan pesan dari diplomasi tersebut juga akan berlipat ganda. Strategi diplomasi publik dengan melibatkan individu yang berpengaruh ini juga mulai dilirik oleh Palestina. Salah satu upaya diplomasi publik Palestina yang dikenal dengan melibatkan individu ialah dukungan Palestina terhadap Mohammed Assaf, pemenang Arab Idol tahun 2013 yang sekaligus juga menjadi orang Palestina pertama yang dapat memenangkan Arab Idol.

Assaf merupakan seorang berkewarganegaraan Palestina yang tumbuh besar di kamp pengungsi Khan Younis, di selatan Gaza. Assaf muncul sebagai kontestan Arab Idol dengan cerita latar belakang yang menggugah, dimana ketika ingin mengikuti audisi Assaf harus berhadapan dengan kaum Hamas di perbatasan yang



ketat di Gaza, menyuap penjaga perbatasan di Mesir, hingga sampai ke tempat audisi di Beirut, Lebanon, saat audisi sudah selesai.¹⁵ Setelah berbulan-bulan melewati kompetisi Arab Idol yang cukup ketat, Assaf pun keluar sebagai pemenang utama dengan dukungan suara paling banyak mengalahkan kedua finalis lainnya. Ketika diumumkan sebagai pemenang, Assaf mengutarakan rasa terima kasihnya yang besar terhadap rakyat Palestina yang telah setia mendukungnya, serta mengutarakan kekagumannya terhadap rakyat Palestina yang telah selama puluhan tahun telah menderita karena penjajahan.¹⁶

Perjuangan Assaf di ajang Arab Idol memiliki arti yang sangat penting dalam perjuangan rakyat Palestina. Dikenal selalu mengenakan kain tradisional Palestina (*keffiyeh*) di bahunya, Assaf beberapa kali menyanyikan lagu-lagu nasionalistik Palestina yang ditujukan untuk para pengungsi di Jerusalem. Figur Assaf menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina yang selama ini menderita karena mengalami kekerasan dan marginalisasi di wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Pesan-pesan yang dibawa oleh Assaf ini sejalan dengan tujuan diplomasi Palestina untuk menggalang dukungan internasional agar kekerasan dan penjajahan di wilayah Palestina segera dihentikan, dan Palestina dapat disahkan sebagai sebuah negara resmi yang berdaulat.

Perjuangan Assaf di Arab Idol pun berhasil menarik perhatian seluruh rakyat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas. Presiden Abbas secara khusus menyempatkan berbicara dengan Assaf via telepon dan kemudian menginstruksikan seluruh kedutaan Palestina di seluruh dunia untuk menghimbau warga ekspatriat untuk memberikan dukungan kepada Assaf. Presiden Abbas bahkan menyebut Assaf sebagai “kebanggaan dari Palestina dan bangsa Arab.”¹⁷ Setelah kemenangannya di

¹⁵ “Palestinian Wins Arab Idol for the First Time,” *Aljazeera.com*, diakses pada 16 November 2016, <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/201362219549114855.html>.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Yolande Knell, “Palestinians back Mohammed Assaf to Win Arab Idol Final,” diakses pada 22 November 2016, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23012803>.



Arab Idol, Presiden Abbas pun menobatkan Assaf sebagai *goodwill ambassador* Palestina dan memberikan Assaf paspor diplomatik. Selain itu, Assaf juga dinobatkan sebagai Duta Muda untuk United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), badan PBB yang secara khusus menangani permasalahan pengungsi Palestina.¹⁸

Setelah berhasil memenangkan Arab Idol dan memperoleh dukungan penuh dari pemerintahan Palestina, Assaf semakin mengembangkan karir bermusiknya di kancah internasional. Album pertamanya yang diberi judul *“The Voice of Gaza”* berhasil memenangkan berbagai penghargaan musik Platinum dan menduduki posisi teratas di tangga lagu Uni Emirat Arab dan wilayah Timur Tengah lainnya. Assaf pernah mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di PBB dan di upacara pembukaan Kongres FIFA dalam rangka menyambut Piala Dunia 2014 di Brazil. Pada bulan Desember 2014, Assaf juga berkesempatan untuk menghibur ribuan fansnya di Methodist Central Hall di Westminster, Inggris, yang berhasil merebut penghargaan MTV untuk kategori *Best Middle East Act of the year*.¹⁹ Dalam setiap kesempatan konsernya di berbagai negara, Assaf juga membawa pesan perdamaian yang positif, bahwa penyelesaian konflik dengan perdamaian merupakan hal yang sangat mungkin untuk terjadi di Palestina dan di seluruh wilayah Timur Tengah.²⁰

Melalui uraian ini, terlihat bahwa Palestina memberikan dukungan yang sangat besar terhadap Assaf yang dianggap sebagai *public figure* yang representatif dari Palestina untuk terus maju dan mengembangkan karirnya secara internasional. Dukungan yang ditujukan Palestina terhadap Assaf ini menunjukkan bahwa negara kini mulai melirik aktor individu untuk menjadi corong diplomasinya, terutama kepada publik internasional. Sesuai dengan konsep diplomasi publik dari Paul Sharp, individu yang dipilih sebagai aktor diplomasi publik ini dinilai dapat menjalin

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Nabila Ramdani, “Westminster Gig Was a Dream Come True, says Arab Idol Star,” diakses pada 22 November 2016, <http://www.standard.co.uk/news/london/westminster-gig-was-dream-come-true-says-arab-idol-star-9943650.html>.

²⁰ Ibid.



hubungan dengan masyarakat internasional dalam rangka membantu negara untuk mewujudkan kepentingan yang dibawanya.

Melalui karya dan penampilannya di berbagai negara, Assaf telah menjadi aktor diplomasi karena telah membantu Palestina untuk mengamplifikasi pesannya agar kekerasan di wilayah Palestina segera dihentikan. Perjuangan dan cerita Assaf juga secara tidak langsung menyuarakan bahwa Palestina perlu segera diakui sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pemilihan Assaf sebagai ikon perjuangan Palestina juga merupakan sebuah pilihan yang tepat mengingat upaya diplomasi yang dilakukan Assaf yaitu melalui instrumen budaya dan kesenian, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat umum tanpa melihat ideologi politik atau agamanya.

KESIMPULAN

Secara umum, diplomasi publik yang dilakukan Palestina bertujuan untuk membentuk persepsi masyarakat internasional bahwa Palestina adalah suatu entitas yang berhak untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Palestina menggunakan instrumen *digital diplomacy* dan *citizen diplomacy* dalam upaya diplomasi publiknya ke seluruh dunia.

Strategi *digital diplomacy* yang ditempuh Palestina dapat terlihat dengan penggunaan akun media sosial dan *website* Presiden Palestina yang diprogram dan diatur sedemikian rupa untuk mendukung pencapaian tujuan diplomasi publik Palestina. Melalui instrumen *digital diplomacy* ini, Palestina berusaha menciptakan persepsi bahwa negaranya sudah dan masih terus mendapatkan pengakuan luas dari berbagai negara berdaulat lainnya, serta sedang berada dalam tahap “*state in the making*.” Karena itulah, Palestina layak untuk mendapatkan pengakuan internasional atas eksistensinya sebagai sebuah negara.

Sementara, strategi *citizen diplomacy* yang dipilih Palestina tampak salah satunya dari dukungan besar-besaran yang diberikan pemerintah Palestina terhadap Mohammed Assaf, pemenang Arab Idol 2013 dari Palestina. Figur Assaf telah menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina yang tidak pernah menyerah atas



penindasan dan kekerasan yang sehari-hari melingkupi mereka. Popularitas dan karya Assaf yang semakin mendunia telah mengamplifikasi pesan bahwa kekerasan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina di atas wilayahnya sendiri harus segera dihentikan. Secara tidak langsung pula, Assaf telah menyuarakan kepada setiap orang yang menonton dan menikmati karyanya bahwa keberadaan Palestina sebagai sebuah negara perlu diakui secara legal-formal, sehingga rakyat dapat memperoleh kehidupan yang layak.

Walaupun tidak ada indikator pasti mengenai keberhasilan kedua strategi diplomasi publik ini, setidaknya penggunaan kedua strategi ini telah menunjukkan usaha pemerintahan Palestina untuk mencari dukungan internasional melalui cara lain selain diplomasi formal di tataran politis. Sebagai upaya alternatif, usaha diplomasi publik Palestina perlu diapresiasi karena setidaknya telah mampu menyuarakan pesan dan kepentingan Palestina kepada masyarakat internasional yang lebih luas di tengah keterbatasan situasi, kondisi, dan birokrasi yang dihadapi Palestina akibat status legal-formalnya.

DAFTAR PUSTAKA

E-book dan Jurnal

- Awad, Samir. "Public Diplomacy and The Question of Palestine." *International Humanities Studies* Vol. 2 No. 3 (2015): 21-40.
- Melissen, Jan. *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005.

Artikel

- Brzezinska, Gozia. "Digital Diplomacy – Why Do We Need to Talk About It." *Portland Communication*. Diakses pada 19 November 2016. <http://www.portland-communications.com/publications/age-of-digital-diplomacy/digital-diplomacy-why-do-we-need-to-talk-about-it/>.
- Jadou, Amal. "The Palestinians Diplomatic Corps." *This Week in Palestine*, Issue #223 (2016). Diakses pada 22 November 2016. <http://thisweekinpalestine.com/the-palestinian-diplomatic-corps/>.
- McClellan, Michael. "Public Diplomacy in the Context of Traditional Diplomacy." Dipresentasikan di Vienna Diplomatic Academy. Vienna. 2004. <http://www.publicdiplomacy.org/45.htm>.



- Manor, Ilan. "Evaluating Palestine's Digital Diplomacy." *University of Southern California Center of Public Diplomacy*. Diakses pada 15 November 2016. <http://uscpublicdiplomacy.org/blog/evaluating-palestines-digital-diplomacy>.
- Rlodan, Shaun. "Cyber Diplomacy vs. Digital Diplomacy: A Terminological Distinction." *University of Southern California Center of Public Diplomacy*. Diakses pada 22 November 2016. <http://uscpublicdiplomacy.org/blog/cyber-diplomacy-vs-digital-diplomacy-terminological-distinction>.
- "Citizen Diplomacy: Building a Nation of Global Citizen Diplomats." *Public Diplomacy Magazine University of Southern California*. Diakses pada 23 November 2016. <http://publicdiplomacymagazine.com/citizen-diplomacy-building-a-nation-of-global-citizen-diplomats/>.

Website

- Knell, Yolande. "Palestinians back Mohammed Assaf to Win Arab Idol Final." Diakses pada 22 November 2016. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23012803>.
- Ramdani, Nabila. "Westminster Gig Was a Dream Come True, says Arab Idol Star." Diakses pada 22 November 2016. <http://www.standard.co.uk/news/london/westminster-gig-was-dream-come-true-says-arab-idol-star-9943650.html>.
- Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012*, New York: United Nations, 2012.
- "Internet Users." *Internet Live Stats*. Diakses pada 19 November 2016. <http://www.internetlivestats.com/internet-users/>.
- "Palestinian Government." *Mission of Palestine in Denmark*. Diakses pada 20 November 2016. <http://palestine.dk/palestine/government/>.
- "Palestinian Wins Arab Idol for the First Time." *Aljazeera.com*. Diakses pada 16 November 2016. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/201362219549114855.html>.
- "The Road to Statehood." *President of the State of Palestine Official Website*. Diakses pada 18 November 2016. <http://president.ps/eng/general.aspx?id=117>.

